

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Fluktuasi harga pada 20 (dua puluh) jenis komoditas strategis selama periode Triwulan II tahun 2025 di Kabupaten Malang, berikut analisis terhadap perkembangan harga:

- a. Pada Triwulan II 2025, beberapa komoditas di Kabupaten Malang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti cabai rawit (53%) akibat penurunan produksi yang disebabkan oleh faktor perubahan cuaca, siklus panen yang belum stabil, dan lonjakan permintaan saat banyak kegiatan sosial di bulan Juni. Bawang putih (18%) turut naik karena tingginya permintaan dan ketergantungan impor. Adapun daging ayam ras (6%) dan bawang merah (4%) mengalami kenaikan moderat akibat naiknya biaya pakan, distribusi, dan permintaan pasar.
- b. Komoditas dengan fluktuasi rendah seperti telur ayam ras dan daging sapi mengalami kenaikan harga yang minimal, berkisar antara 1-3% selama Triwulan II 2025, yang mengindikasikan kondisi pasokan yang cukup dan permintaan yang terkendali, serta distribusi yang berjalan relatif lancar.
- c. Selama Triwulan II 2025, sejumlah komoditas seperti beras medium, minyak goreng, dan gula pasir tidak mengalami fluktuasi harga (0%), yang mencerminkan stabilitas pasokan dan distribusi yang baik, serta kemungkinan adanya intervensi pemerintah melalui pengaturan harga atau subsidi untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat.
- d. Pada Triwulan II Tahun 2025, harga komoditas di Kabupaten Malang mengalami fluktuasi yang cukup mencolok, terutama pada cabai dan bawang yang memerlukan perhatian melalui stabilisasi harga, distribusi antar daerah, dan penguatan kelembagaan petani. Sementara itu, komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan protein hewani relatif stabil. Pola ini menegaskan pentingnya intervensi pasokan sejak masa prapanen, serta koordinasi lintas perangkat daerah dan optimalisasi peran TPID dalam menjaga keterjangkauan harga dan kestabilan pasokan bagi masyarakat.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) selama periode Triwulan II tahun 2025 di Kabupaten Malang dianalisa sebagai berikut:

- a. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Malang pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan harga kebutuhan pokok di pasar rakyat. Periode ini memberikan gambaran kondisi pasar yang cukup bergejolak dan patut menjadi perhatian bersama.
- b. Memasuki bulan April 2025, tren harga mengalami penurunan. IPH tercatat negatif, dimulai dari -1,04 pada minggu kedua dan terus menurun hingga -3,21 pada awal Mei. Fenomena ini bisa disebabkan oleh tingginya pasokan barang atau melemahnya daya beli masyarakat, yang membuat hargaharga cenderung turun. Bagi pelaku pasar, kondisi ini bisa berarti tantangan dalam menjaga pendapatan.
- c. Pada Mei 2025, sempat berada di titik netral pada minggu kedua dengan IPH sebesar 0,00. Di minggu-minggu berikutnya, IPH kembali turun tajam, bahkan mencapai -4,79 di akhir bulan. Ini menunjukkan tekanan deflasi yang cukup berat, yang dapat berdampak pada keberlangsungan usaha mikro dan kecil.
- d. Kenaikkan IPH dalam batas wajar pada Juni 2025. IPH menunjukkan tren positif, dari 0,75 di minggu pertama hingga mencapai 2,36 di minggu keempat. Kenaikan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah—seperti operasi pasar murah dan penguatan distribusi stok pangan—mulai membuahkan hasil. Harga kebutuhan pokok mulai stabil, dan daya beli masyarakat mulai stabil.

Kesimpulannya, pergerakan IPH pada Triwulan II mencerminkan adanya tekanan harga

e.

di awal yang cukup berat, namun diakhiri dengan pemulihan yang menjanjikan. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan agar lonjakan harga tidak membebani masyarakat, khususnya menjelang periode permintaan tinggi seperti hari besar keagamaan atau musim panen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kabupaten Malang dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K hingga periode pelaporan triwulan II Tahun 2025, antara lain:

1. Pada Triwulan II Tahun 2025, Kabupaten Malang menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok yang cukup kompleks. Lonjakan harga yang signifikan terjadi pada komoditas hortikultura, terutama cabai rawit dan bawang, yang dipicu oleh penurunan produksi akibat cuaca ekstrem, belum stabilnya siklus panen, serta peningkatan permintaan saat momen kegiatan sosial seperti hajatan pernikahan dan budaya Bersih Desa di bulan Juni 2025;
2. Di sisi lain, Indeks Perkembangan Harga (IPH) mengalami tekanan deflasi cukup dalam selama bulan April hingga Mei 2025, bahkan mencapai -4,79%. Kondisi ini bisa mencerminkan kelebihan pasokan atau melemahnya daya beli masyarakat, yang dapat berimplikasi langsung terhadap pelaku usaha dan pedagang kecil;
3. Selain gejolak harga, masih terdapat ketimpangan stabilitas antar-komoditas. Komoditas seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng terpantau relatif stabil, namun harga komoditas protein hewani mengalami kenaikan moderat yang tetap perlu diantisipasi agar tidak menurunkan konsumsi rumah tangga. Resiko lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan atau musim panen juga menjadi isu krusial yang harus dipersiapkan secara terencana;
4. Belum optimalnya kelembagaan pengendalian inflasi, baik dari sisi kapasitas kelembagaan petani dan peternak, maupun dalam koordinasi lintas sektor dan kesiapsiagaan intervensi pasar. Meskipun telah banyak upaya dilakukan, mulai dari distribusi bantuan pangan, bimtek petani dan peternak, hingga pembangunan infrastruktur pendukung, respons kebijakan masih cenderung reaktif;
5. Secara keseluruhan, permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Malang menuntut penguatan sinergi antarsektor, peningkatan peran TPID, serta langkah-langkah preventif yang menyentuh akar persoalan, agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan;
6. Perubahan cuaca memengaruhi produksi dan distribusi komoditas pangan dan hortikultura menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga sehingga pengelolaan pasokan dengan melibatkan teknologi yang lebih adaptif terhadap faktor cuaca sangat diperlukan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Malang yang telah dilaksanakan oleh TPID Kabupaten Malang berdasarkan Strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian Inflasi, antara lain:

a. Ketersediaan Pasokan

1. Bupati Malang menyerahkan bantuan hibah berupa benih dan pakan ikan nila kepada

- Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Mitra Muda Mandiri di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi budidaya perikanan air tawar dan mendukung ketahanan pangan berbasis potensi lokal.
2. Sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan keluarga, Bupati Malang menyerahkan bantuan hibah Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) kepada Kelompok Tani Taruna Tani Nyawiji Slamet di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan bergizi, berkelanjutan, dan mandiri.
 3. Untuk mendukung ketahanan pangan mandiri berbasis komunitas, Bupati Malang menyerahkan bantuan hibah bahan baku pangan kepada Kelompok Perikanan Mina Subur Makmur dan sekaligus melakukan penebaran benih ikan di Embung Desa Malanguko, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Langkah ini bertujuan menjaga kesinambungan pasokan protein hewani serta pemberdayaan kelompok perikanan lokal.
 4. Wakil Bupati Malang menghadiri acara Panen Padi hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Pusat Sains dan Rekayasa LPPM Universitas Negeri Malang pada 11 Juni 2025, di lahan penelitian Desa Sumbergepoh, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Kegiatan ini menjadi contoh kolaborasi nyata antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi pertanian berbasis riset yang produktif dan berkelanjutan.
 5. Dalam rangka mendukung target swasembada pangan daerah dan nasional, Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Blitar pada 19 Mei 2025. Fokus kunjungan diarahkan pada pembelajaran praktik baik pengelolaan peternakan ayam, peternakan sapi, serta pertanian tebu sebagai bahan evaluasi dan pengembangan komoditas serupa di Kabupaten Malang.
 6. Pada 8 Mei 2025, Bupati Malang melakukan kunjungan ke Kabupaten Banyuwangi untuk meninjau pengembangan tebu varietas unggul Cening di lahan milik PT Tirta Harapan Perkebunan Bayu Kidul, Desa Sumber Anom, Kecamatan Songgon. Tebu Cening dinilai potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Malang guna meningkatkan produksi gula nasional.
 7. Bupati Malang menghadiri pembukaan Musim Giling PT Pabrik Gula Rajawali I Unit Pabrik Gula Krebet Baru Tahun 2025 yang berlangsung pada 24 April 2025 di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kehadiran ini menunjukkan komitmen Pemkab Malang dalam mendukung revitalisasi industri gula nasional melalui sinergi dengan BUMN dan petani tebu lokal.
 8. Pada 27 April 2025, Bupati Malang menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Serentak seluas 150 hektar di Desa Rembun, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan kerja sama multipihak yang melibatkan Polri, Kementerian Pertanian, GAPKI, Perhutani, Inhutani, serta swasta dan petani swadaya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan.
 9. Pada 7 April 2025, Bupati Malang bersama Danrem 083 Baladhika Jaya dan Forkopimda Kabupaten Malang melakukan Panen Raya Padi di Desa Kemulan, Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Panen dilakukan menggunakan alat modern combine harvester, sebagai simbol penerapan mekanisasi pertanian guna meningkatkan efisiensi dan hasil produksi padi petani.
 10. Bupati Malang meresmikan Wisata Edukasi Garam dan memimpin panen sebanyak 5 ton garam tunnel pada 15 April 2025 di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan inovasi pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam pesisir dan edukasi masyarakat.
 11. Pada 24 April 2025, dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan Pakan Ternak di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Kegiatan ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas ternak melalui

peningkatan kualitas dan efisiensi pakan, serta mendorong keberlanjutan sistem peternakan rakyat.

12. Bimtek Kelembagaan Kelompok Peternak di Desa Kuwolo, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, pada 27 Mei 2025, menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Malang dalam memperkuat kapasitas kelembagaan peternak. Kegiatan ini mencakup pelatihan manajerial, administrasi kelompok, serta adopsi teknologi tepat guna, guna mendorong produktivitas dan kemandirian peternak.
13. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang berkontribusi aktif dalam pengendalian inflasi dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, seperti embung, jaringan irigasi permukaan, dan bendung irigasi. Di sisi kelembagaan, penguatan peran HIPPA/GHIPPA/IHIPPA terus ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan irigasi partisipatif dan ketahanan pangan daerah.
14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Kegiatan mencakup penguatan pasokan pangan, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, serta pemberdayaan petani melalui pemanfaatan teknologi dan kelembagaan untuk mendorong keberlanjutan sistem pangan lokal.
15. Triwulan II Tahun 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang terus mendampingi peternak agar makin tangguh dan berdaya saing. Komitmen ini diwujudkan melalui bimbingan teknis (Bimtek) yang responsif terhadap kebutuhan lapangan, meliputi: Bimtek Pengolahan Pakan Ternak berbasis bahan lokal, Budidaya Ternak unggas dan ruminansia berkelanjutan, penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kewaspadaan penyakit melalui Biosecurity 3 Zona, serta Bimtek Pemasaran Online di enam kecamatan sebagai strategi adaptif memperluas akses pasar di era digital.

b. Keterjangkauan Harga

1. Bupati Malang secara resmi melounching Stokis Pangan di Bumdesma Kusuma Jaya LKD, Desa Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai langkah konkret dalam memperkuat distribusi pangan di tingkat desa sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Acara turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Kepala KPw BI Malang, GM PT Telkom Indonesia Malang, Forkopimcam Poncokusumo, serta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Poncokusumo, menandakan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
2. Pasar Sembako Murah 2025 rutin dilaksanakan 4 kali dalam satu bulan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang bertajuk 'SULING SMART' (Sholat Subuh Keliling Berjamaah dan Sembako Murah Harga Terjangkau) setiap minggu dengan menjual komoditi Gula Pasir, Beras, Minyak Goreng dan Sayur Mayur dengan harga terjangkau (dibawah harga pasar);
3. Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Malang rutin dilaksanakan setiap awal bulan di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan sejumlah titik strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta menekan angka inflasi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang melaksanakan program pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok (bapak) di pasar rakyat dan distributor. Dari 34 UPPD, sebanyak 21 UPPD dijadikan sampel, dengan hasil berupa laporan harian perkembangan harga 20

komoditas bahan pokok yang diinput secara rutin ke laman Wasinflasi Kemendagri melalui Inspektorat Kabupaten Malang.

5. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang mendorong daya beli masyarakat dan menjaga keterjangkauan harga melalui penyaluran pinjaman modal kerja kepada 52 UMKM dan 2 koperasi dengan total nilai Rp1,51 miliar. Selain itu, untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa, telah difasilitasi pendirian 390 Koperasi Desa Merah Putih berbadan hukum. Langkah ini diharapkan mendukung ketahanan pangan berbasis desa serta mendorong pemerataan ekonomi menuju kemandirian masyarakat.

c. Kelancaran Distribusi

1. Rapat Koordinasi Finalisasi Draft Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Kabupaten Malang dengan Kabupaten Ponorogo pada hari Jumat, 13 Juni 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang.
2. Wakil Bupati Malang hadir Sekartaji (Sinergi Menuju Ekonomi yang Kreatif, Tangguh, Teruji dan Terdigitalisasi) 2025 x Festival Bromo, dirangkaikan seremonial penandatanganan MoU Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Ponorogo, di Ballroom pada tanggal 17 Juni 2025 di Hotel Grand Mercure Kota Malang
3. Pada Triwulan II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terus berkomitmen melanjutkan program perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran distribusi ekonomi dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi peningkatan jalan sepanjang 55 km, pembangunan jalan strategis 26 km, rehabilitasi jalan 30 km, serta pemeliharaan rutin sepanjang 32 km. Upaya ini tidak hanya berdampak pada efisiensi arus barang dan jasa, tetapi juga memperkuat aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi dan layanan dasar. Hingga akhir Triwulan II, capaian kondisi jalan mantap di wilayah Kabupaten Malang telah mencapai 74%, menunjukkan progres positif menuju infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
4. Pada Triwulan II Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang melaksanakan berbagai program strategis dalam mendukung pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui peningkatan kelancaran distribusi, keselamatan transportasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengujian berkala kendaraan bermotor guna menjamin keselamatan teknis dan efisiensi distribusi barang; penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu, marka, Apil, dan warning light di ruas jalan kabupaten; sosialisasi anti-ODOL bersama Satlantas Polres Malang untuk menekan risiko kecelakaan; manajemen lalu lintas dilakukan melalui pengawalan, pengaturan arus, dan penataan parkir agar mobilitas barang dan jasa tetap berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan strategis daerah.

d. Komunikasi Efektif

1. Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan program Sambang Desa Gotong Royong (Samdesgotro) 2025 sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa dan memastikan program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Samdesgotro berlangsung pada Januari dan Februari 2025 di 33 kecamatan dengan agenda kegiatan meliputi: Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Ekplorasi dan pengembangan potensi ekonomi sektor pertanian, peternakan, wisata dan UMKM dan Peninjauan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi desa dan infrastruktur.
2. Partisipasi dalam rapat koordinasi daring sebanyak empat kali dalam sebulan yang

diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2025. Menindaklanjuti arahan Mendagri, kegiatan dilanjutkan dengan rapat teknis bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang, yang difokuskan pada perumusan langkah responsif menghadapi lonjakan harga bahan pokok serta penguatan sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di wilayah Kabupaten Malang

3. Rapat koordinasi Penguatan Kapasitas Pengawas BUMDesma dalam Mendukung Stokis Pangan Model Diversifikasi Usaha Menuju Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan Desa di Kabupaten Malang, bertempat di Ruang Rapat Anusapati Malang.
4. 22 April 2025 Bupati Malang menerima kunjungan kerja Bupati Aceh Tengah di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang. Pertemuan membahas kerja sama pengelolaan sampah, serta studi tiru tata kelola pertanian, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pariwisata.
5. Pada 21 Mei 2025, telah dilaksanakan Rapat Optimalisasi Pengembangan Kawasan Pedesaan dengan tema “Diversifikasi Usaha BUMDESma LKD Menuju Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan Melalui Stokis Pangan” bertempat di Ruang Rapat Anusapati Lt. 2, Jl. Merdeka Timur, Malang. Rapat ini membahas skema kolaborasi antar OPD dan stakeholder dalam mendukung inovasi stokis pangan, penyusunan SOP pembentukan kios pangan, serta pembentukan tim kerja untuk percepatan diversifikasi usaha BUMDESma LKD sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan.
6. Bupati Malang menghadiri rapat tertutup bersama Menteri PU Dody Hanggodo di Ruang Rapat Menteri PU Jakarta Selatan 14 April 2025, mendampingi Gubernur Jawa Timur dan sejumlah bupati, membahas dukungan Pemerintah Pusat terhadap swasembada pangan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Jawa Timur.
7. Updating data harga sembako setiap hari pada UPPD Turen, Singosari, Lawang, Karangploso dan Kepanjen melalui website SISKAPERBAPO Provinsi Jawa Timur dan setiap hari Senin dan Kamis melalui website SIHARKEPO Kabupaten Malang.
8. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang secara rutin melaksanakan input data harga harian atas 20 komoditas bahan pokok strategis serta mengunggah bukti dukung atas berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan TPID Kabupaten Malang ke laman resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemantauan pengendalian inflasi daerah sesuai arahan pemerintah pusat, serta memperkuat transparansi dan respons pemerintah daerah dalam menjaga harga dan daya beli masyarakat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Pada Triwulan II Tahun 2025, dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Malang menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan. Tekanan deflasi yang terjadi di bulan April hingga Mei mencerminkan kondisi pasar yang cukup rentan, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Gejolak harga yang paling mencolok terjadi pada komoditas hortikultura seperti cabai rawit dan bawang putih, yang mengalami lonjakan akibat faktor iklim, siklus panen tidak stabil, dan tingginya permintaan musiman.
- b. Komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir tercatat relatif stabil sepanjang periode ini. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas berbagai intervensi yang telah dilakukan, mulai dari operasi pasar, penguatan distribusi, hingga pelaksanaan program ketahanan pangan seperti Stokis Pangan, Pasar Sembako Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang tidak hanya membantu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kehadiran pemerintah

dalam menjaga stabilitas pangan di tengah dinamika ekonomi.

- c. Program kegiatan yang dilaksanakan mencakup bantuan benih dan pakan, bimbingan teknis kepada petani dan peternak, penyelenggaraan panen raya, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan perbaikan jalan. Seluruh upaya ini mencerminkan sinergi lintas sektor yang solid dalam mendukung keterjangkauan harga, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi pangan, sebagai bagian dari komitmen nyata Pemerintah Daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan laju inflasi di tingkat lokal.
- d. Masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti ketergantungan pada impor untuk komoditas bawang putih yang rentan terhadap fluktuasi global, distribusi yang masih terganggu apabila terjadi cuaca ekstrem atau kerusakan infrastruktur, serta kelembagaan petani dan peternak yang masih perlu diperkuat agar lebih tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika pasar dan iklim yang terus berubah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Dalam rangka memperkuat produksi dan ketahanan pangan lokal, Pemerintah Kabupaten Malang agar terus mendorong perluasan budidaya komoditas rawan inflasi seperti cabai dan bawang melalui pola tanam yang lebih terjadwal dan adaptif terhadap kondisi cuaca. Upaya ini juga didukung oleh percepatan penerapan hasil riset dan teknologi pertanian, seperti mekanisasi pertanian, penggunaan varietas unggul, serta penerapan biosecurity pada sektor peternakan. Selain itu, model kolaborasi riset yang telah diterapkan bersama Universitas Negeri Malang pada panen padi akan direplikasi ke komoditas strategis lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- b. Untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi, program-program strategis seperti Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan pengembangan Stokis Pangan Desa terus dilanjutkan dan diperluas sebagai buffer distribusi pangan di tingkat lokal. Di sisi lain, koordinasi antar daerah melalui skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga diperkuat guna menjembatani pasokan dan kebutuhan lintas wilayah, khususnya dalam mengatasi ketimpangan antara daerah defisit dan surplus komoditas.
- c. Penguatan kelembagaan petani dan pelaku UMKM menjadi fokus penting untuk menciptakan ekosistem pangan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Berbagai kegiatan bimbingan teknis kelembagaan, pendampingan legalitas usaha, hingga pelatihan pemasaran digital terus ditingkatkan. Di samping itu, transformasi koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga didorong agar lebih adaptif dalam menghadapi tantangan pasar serta mampu berperan aktif dalam rantai pasok pangan daerah.
- d. Optimalisasi sistem informasi dan pemantauan harga menjadi kunci dalam menciptakan respons kebijakan yang cepat dan tepat. Pemanfaatan platform digital seperti SIHARKEPO, SISKAPERBAPO, dan Wasinflasi Kemendagri terus diperkuat untuk identifikasi dini gejolak harga dan pelaksanaan intervensi yang lebih efektif. Guna menunjang hal ini, peningkatan kapasitas SDM penginput dan pengelola data juga menjadi prioritas agar kualitas analisis semakin baik dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- e. Kolaborasi dan komunikasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang komprehensif. Rapat koordinasi TPID secara rutin dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyusun kebijakan yang berbasis data dan hasil evaluasi lapangan. Selain itu, penyusunan roadmap aksi tematik untuk masing-masing komoditas prioritas juga terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari OPD teknis, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas, guna menciptakan sinergi yang kuat dan berkelanjutan.